

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Pemikiran	10
G. Langkah-Langkah Penelitian	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI DALAM MENANDATANGANI PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM	
A. Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala Daerah	24
B. Kedudukan dan Kewenangan Kepala Daerah dalam Perspektif Siyasah	37
C. Mekanisme Pemakzulan	
D. Landasan dan Tata Cara Pembentukan Produk Hukum	49
BAB III ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI SUMEDANG DALAM MENANDATANGANI PRODUK HUKUM DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM	
	61

A. Kedudukan dan Kewenangan Wakil Bupati Sumedang dalam Menandatangani Produk Hukum Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum	61
B. Produk Hukum yang ditandatangani Oleh Wakil Bupati Sumedang dan Dasar Pertimbangan seta Dampak Penandatanganan Produk Hukum Daerah	68
C. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Wakil Bupati Sumedang dalam Menandatangani Produk Hukum Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum	78
BAB IV PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

